



**KONFLIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN WENGKON DESA GETAS DI  
KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Syifa Alifah Rahmat<sup>1</sup>, Bowo Dwi Siswoko<sup>2</sup>

**INTISARI**

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UGM telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.632/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2016 untuk tujuan pendidikan dan pelatihan yang sebelumnya dikelola oleh Perhutani. Perubahan status dan pengelolaan tersebut memicu munculnya konflik di Hutan Wengkon Desa (HWD) Getas dan dapat berdampak negatif pada hutan dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi struktur dan proses konflik dalam pengelolaan HWD Getas; (2) merumuskan strategi resolusi konflik dalam pengelolaan HWD Getas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam menggunakan *purposive sampling* pada aktor – aktor yang terlibat pengelolaan KHDTK, serta data sekunder yang diperoleh dari studi literatur/dokumentasi. Analisis konflik dimulai dari penentuan tema dan area konflik, kemudian identifikasi aktor dan kepentingan, dilanjutkan dengan penjabaran struktur dan proses konflik, sehingga dapat ditentukan determinan dan strategi resolusi konflik.

Aktor yang terlibat dalam pengelolaan KHDTK UGM yaitu UGM, Perhutani, Pemerintah Desa Getas, masyarakat/petani *mbaon*, petani tebu, KTH, dan LMDH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur konflik yang terjadi disebabkan oleh perubahan sosial dan perbedaan kepentingan antar aktornya. Proses konflik dijelaskan melalui tahapan prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pascakonflik. Kasus yang pernah terjadi yaitu perusakan tanaman RHL, penananam tebu, penebangan liar dan pencurian kayu, serta pungutan liar oleh oknum Perhutani. Strategi resolusi konflik yang dapat dilakukan yaitu mempertemukan pihak berkonflik dan merancang solusi bersama, membuat kesepakatan dengan pihak berkonflik, memberikan sosialisasi tentang peraturan yang berlaku, dan membentuk kerja sama dan perjanjian dengan Pemerintah Desa.

Kata Kunci: konflik, pengelolaan hutan, resolusi konflik, KHDTK

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM

<sup>2</sup> Staf Pengajar Fakultas Kehutanan UGM



***CONFLICT WITHIN THE MANAGEMENT OF GETAS VILLAGE FOREST IN  
THE FOREST AREAS WITH SPECIFIC OBJECTIVES UGM***

Syifa Alifah Rahmat<sup>1</sup>, Bowo Dwi Siswoko<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The Forest Areas with Specific Objectives (KHDTK) UGM has been established by the Decree of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number SK.632/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2016 for education and training purposes previously managed by Perhutani. Status and management changes triggers conflicts in Getas Village Forest (HWD) and could have negative impact on forests and communities. This study aims to: (1) identify conflict structure and process in the management of HWD Getas; (2) formulate conflict resolution strategies in the management of HWD Getas.*

*The method used in research is case studies with qualitative approach. Data types used is primary data obtained through observation and in-depth interviews using purposive sampling on the actors, and secondary data obtained from literature/documentation studies. Conflict analysis begins with determining the theme and area of conflict, identifying actors and interests, elaborating the conflict structure and process, so that conflict resolution strategies can be determined.*

*Actors involved in the management of KHDTK are UGM, Perhutani, Getas Village Government, communities, sugarcane farmers, KTH, and LMDH. The results showed that the conflict structure was caused by social changes and differences in interests between the actors. The conflict process is explained through the stages of pre-conflict, confrontation, crisis, consequence, and post-conflict. Cases that have occurred are the destruction of RHL crops, sugarcane plantations, illegal logging, and illegal levies. Conflict resolution strategies are bringing together conflicting parties and designing joint solutions, making agreements with conflicting parties, providing socialization of applicable regulations, and forming cooperation and agreements with the Village Government.*

*Keyword:* conflict, forest management, conflict resolution, KHDTK

---

<sup>1</sup> Student of Faculty of Forest UGM

<sup>2</sup> Lecturer of Faculty of Forest UGM